

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa. Terdapat 5.957 perdesaan di wilayah Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2020a). Karakter perdesaan di Jawa Barat umumnya merupakan daerah-daerah pinggiran kota dan dataran tinggi. Sensus pada tahun 2019, penduduk Jawa Barat diperkirakan sebanyak 48,27 juta jiwa. Terdiri dari 44,28 juta jiwa yang tinggal sesuai KTP dan 3,99 juta jiwa yang tinggal tidak sesuai KTP (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021a). Penduduk Jawa Barat memiliki rata-rata lama sekolah selama 8,32 tahun (Badan Pusat Statistik, 2019a).

Komoditas unggulan perdesaan di Jawa Barat terdiri dari 4 kelompok (Bappenas, 2011) yang meliputi:

- a) Kelompok komoditas tanaman pangan: padi, kedelai, Jagung, ubi kayu dan kacang tanah;
- b) Kelompok komoditas hortikultura: kentang, cabe merah, bawang merah, mangga, manggis, pisang, anggrek, durian, rimpang dan jeruk;
- c) Kelompok komoditas perkebunan: kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman serat, tebu, tembakau, dan cengkeh (tanaman obat);
- d) Kelompok komoditas peternakan: sapi potong, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik

Dari semua Komoditas tersebut jika diurutkan menggunakan metode MPE akan mendapatkan urutan prioritas komoditas utama Jawa Barat sebagai berikut pada Tabel I.1.

Tabel I. 1 Komoditas Utama Jawa Barat

Urutan Prioritas	Kriteria Prioritas	Total Nilai MPE
1	Kopi	4.763.703.052
2	Cengkeh	2.421.606.604
3	The	1.926.545.436
4	Tembakau	1.610.384.394
5	Kelapa Dalam	1.159.199.932
6	Karet	1.097.693.676
7	Tebu	958.59.794
8	Kakao	639.150.440

Sumber: (Kharisma & Nur, 2019)

Luas lahan sawah di Jawa Barat cenderung menyusut (Widjojo, 2016). Didukung dengan data pemerintah Indonesia, dimana luas panen padi di wilayah Jawa Barat terus menyusut.

Tabel I. 2 Luas Panen Padi di Jawa Barat

Luas panen padi Jawa Barat (Hektar)	
2019	1.578.835,70
2018	1.691.725
2015	2.265.323

Sumber: BPS.go.id

Secara keseluruhan, perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp530,79 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp371,22 triliun (BPS Provinsi Jawa Barat, 2020). Komoditas yang telah di sebutkan di atas, menjadi salah satu penyumbang PDRB di Jawa barat. Namun jumlah orang miskin di perdesaan Jawa Barat per September 2020 masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 1.183.570 Jiwa (Badan Pusat Statistik, 2020b) atau 10,64% dari total penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020c).

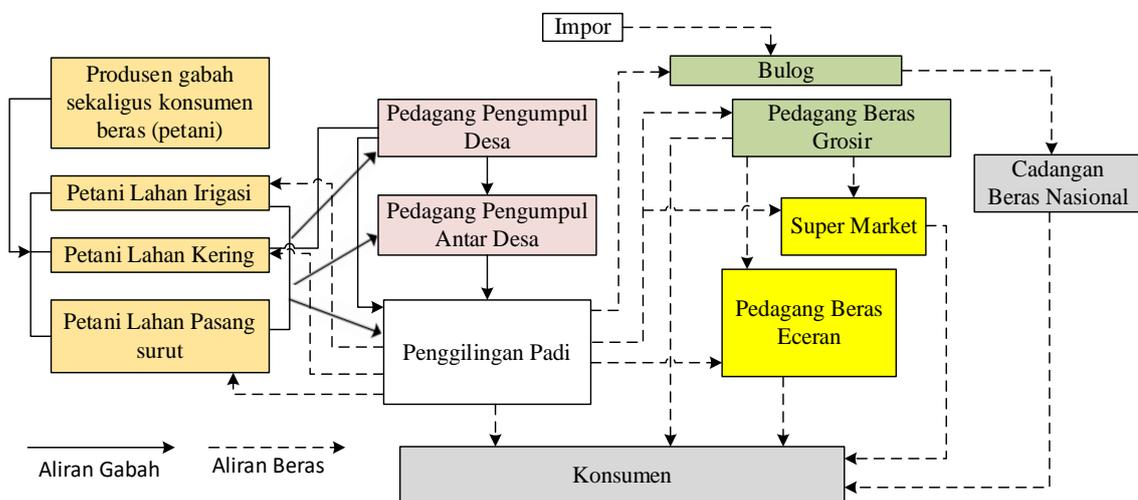
## 1.2 Latar Belakang

Sejak tahun 2019 pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memanfaatkan teknologi informasi pada wilayah perdesaan dengan meluncurkan berbagai program Desa Digital (Noviantoro, 2019). Desa Digital adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diintegrasikan ke dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Salah satu tujuan program ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi desa lewat pengembangan potensi desa, dan pemasaran (Alvaro & Octavia, 2019).

Program pengembangan potensi ekonomi dilakukan karena tingkat kemiskinan di perdesaan lebih besar dari pada di perkotaan. Hal itu dibuktikan dengan data pemerintah bahwa 13,2 % orang miskin ada di desa, sedangkan kemiskinan perkotaan hanya sebesar 7,88 % pada Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021a). Di Jawa Barat sendiri per September 2019 persentase kemiskinan di perdesaan ada sebanyak 9,58%. Persentase kemiskinan tersebut naik pada September 2020 menjadi 10,64 % (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021b).

Kemiskinan didesa terjadi karena faktor akses pasar. Dimana karena kebanyakan pelaku usaha tidak memiliki akses ke beberapa pihak, seperti BULOG, pabrik, dan toko. Sedangkan tengkulak memiliki jaringan yang kuat dan bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga tengkulak sangat menguasai pasar, sedangkan akses petani sangat terbatas (Megasari, 2019). Selain itu karena keterbatasan akses pasar, petani juga memiliki masalah mobilitas. Tempat tinggal di daerah yang relatif jauh dari perkotaan, mengakibatkan mereka mengalami kesulitan mobilitas dalam memasarkan hasil pertanian. Kondisi-kondisi tersebut membuat petani terpaksa menjual hasil tani kepada tengkulak dengan harga jauh dibawah harga kelayakan pasar (Warto, 2015).

Masalah lainnya timbul akibat dari penjualan kepada tengkulak adalah masalah pada *value* hasil usaha yang dijual. Dimana kebanyakan pelaku usaha di perdesaan hanya menjual *raw material* kepada tengkulak, tak terkecuali pada usaha pertanian. Pada Gambar I.2 merupakan rantai pasok yang berjalan pada kebanyakan usaha pertanian padi yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Kebanyakan petani di Jawa Barat hanya menjual hasil taninya dalam bentuk gabah. Pengelolaan hasil tani biasanya baru terjadi mulai di pedagang tengkulak.



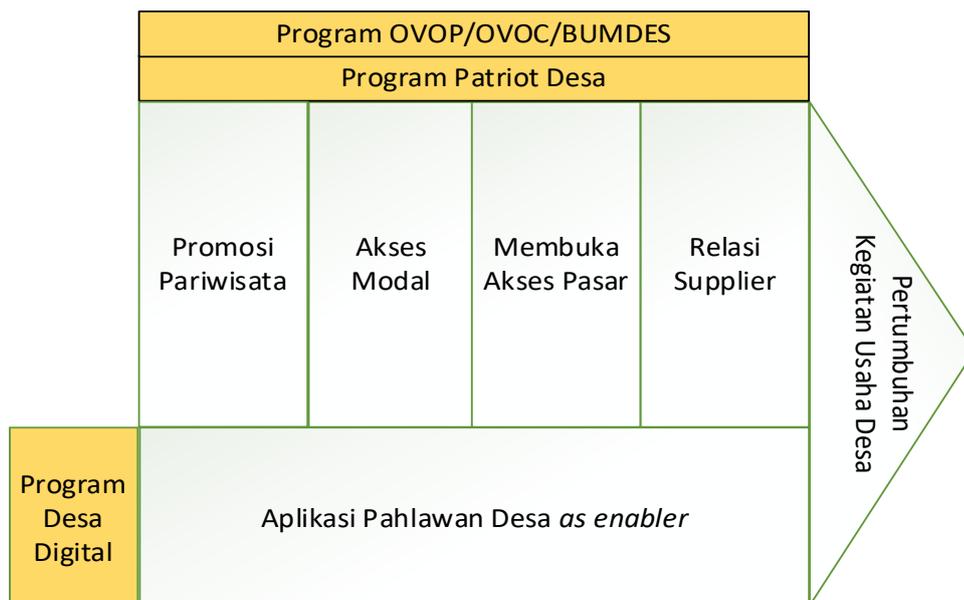
Gambar I. 1 Rantai Pasok Komoditas Pertanian di Jabar, Kalbar, dan Kalsel

Sumber: (Swastika & Sumaryanto, 2013)

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Jawa Barat melakukan berbagai program kolaborasi yang disebut dengan konsep pembangunan pentahelix. Konsep pembangunan pentahelix mengkolaborasikan pemerintah,

masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media untuk bersatu dalam pembangunan desa (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2020). Salah satu program kolaborasi pentahelix yang dijalankan oleh pemerintah Jawa Barat adalah *One Village One Company* (OVOC). OVOC merupakan payung program yang bertujuan untuk memandirikan desa dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, dengan pemanfaatannya dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada dasarnya, OVOC merupakan pengembangan dari program *One Village One Product* (OVOP). OVOP merupakan program pengembangan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian sejak tahun 2008 (Ratmono et al., 2016). Akan tetapi, dalam program OVOP masih ditemukan kendala terkait pemasaran (Badrudin, 2011). Sehingga pemerintah Jawa Barat mengembangkan program OVOC, dimana dalam perogram tersebut pasar terlebih dahulu dicari, sehingga produk yang dihasilkan akan mudah terjual (Natalia, 2020).

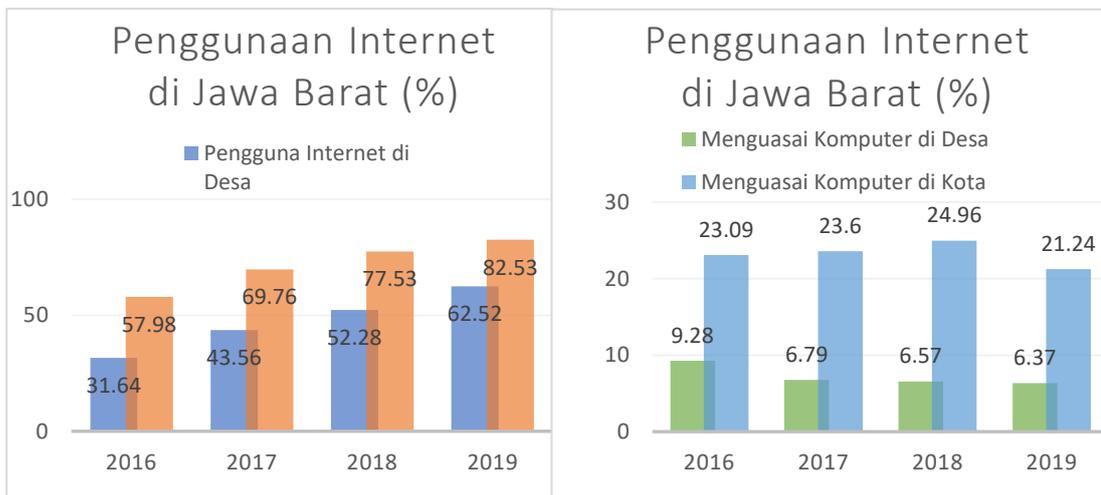
Untuk menjalankan program OVOC, pemerintah Jawa Barat membutuhkan *enabler*. Pemerintah Jawa Barat melalui Diskominfo Jawa Barat membangun *E-Business Service Platform* yang diberi nama “Pahlawan Desa”, sebagai *enabler* dari program OVOC, sekaligus sebagai salah satu bentuk dari penerapan Desa Digital oleh Pemerintah Jawa Barat.



Gambar I. 2 Program Pemerintah Jawa Barat  
Sumber: (Mukti et al., 2021)

Pahlawan Desa merupakan *platform* berbasis aplikasi dan web yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan kegiatan usaha di Desa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian penduduknya. Berdasarkan tujuannya yang dapat dilihat pada Gambar 1.2, maka jenis-jenis layanan dalam Pahlawan Desa telah disesuaikan untuk mencapai tujuannya. Layanan tersebut terdiri dari layanan promosi dan akses pendanaan untuk pengembangan usaha, serta layanan akses pasar dan akses bahan baku untuk efisiensi rantai pasok.

Namun dibalik harapan pertumbuhan kegiatan perekonomian melalui Pahlawan Desa, masih ada tantangan dalam proses adopsi Pahlawan Desa. Sebagai teknologi baru, Pahlawan Desa belum tentu dapat diterima oleh masyarakat desa. Program penerapan tentu diperlukan karena tingginya tingkat resiko kegagalan implementasi teknologi baru (Sirat, 2013). Di Provinsi Kalimantan Selatan pernah terjadi kegagalan penerapan teknologi produksi jagung. Dimana berdasarkan hasil survey evaluasi hanya sebanyak 2 % petani jagung yang tertarik untuk menggunakan teknologi tersebut, sedangkan 66% tidak tertarik dan 12% tidak menjawab (Margaretha & Syuryawati, 2010). Pemerintah Jawa Barat tidak ingin hal tersebut terjadi, pada penerapan Pahlawan Desa.



Gambar I. 3 Penggunaan Teknologi Di Jawa Barat

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019b)

Tantangan penerapan Pahlawan Desa berakar dari sentralisasi yang mengakibatkan infrastruktur digital tidak merata hingga ke perdesaan (Onitsuka et al., 2018). Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat desa mengalami

kesenjangan digital. Kesenjangan digital adalah kesenjangan dalam akses ke informasi, pengetahuan, dan jaringan digital (OECD, 2001). Jika dilihat dari gambar I.3 dapat diketahui bahwa, walaupun masih di provinsi yang sama (Jawa Barat), penggunaan teknologi di perdesaan masih tertinggal daripada di perkotaan. Selain itu ada stereotipe yang melekat pada permasalahan terhadap penerapan teknologi desa yaitu akses internet di wilayah perdesaan masih sulit dan jika ada akses kualitasnya sangat rendah (Muhammad, 2016). Namun hal positif yang ditemui sebagai langkah awal dalam penelitian ini adalah ditemukannya fakta bahwa masyarakat desa tetap menggunakan telpon genggam yang dimilikinya untuk *browsing* (Sunarsi & Dirgahayu, 2015).

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pahlawan Desa memiliki peluang dapat diterima oleh masyarakat desa dalam hal ini adalah Unit Usaha Desa sebagai pengguna Pahlawan Desa. Namun, perlu pengujian terkait variabel-variabel yang berpengaruh terhadap penerapan Pahlawan Desa dikalangan Unit Usaha Desa, untuk memastikan Pahlawan Desa dapat diterima oleh Unit Usaha Desa.

Model adopsi teknologi TAM cocok untuk digunakan sebagai dasar pengujian variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini. Hal tersebut karena TAM adalah model yang telah diterima secara luas untuk memahami proses adopsi dan penggunaan teknologi (Gangwar et al., 2015), sesuai dengan penelitian ini yang berkaitan dengan adopsi penggunaan teknologi. Dan karena penelitian ini berada pada tingkat organisasi, maka dalam penelitian ini juga menggunakan kerangka TOE untuk memetakan variabel-variabel yang akan di uji. Kerangka TOE digunakan karena telah menjadi model penting dalam adopsi teknologi (Azadegan & Teich, 2010), karena dapat diterapkan pada berbagai jenis adopsi inovasi organisasi (Zhu & Kraemer, 2005). Variabel-variabel TAM yang akan dimasukkan kedalam kerangka TOE disusun berdasarkan literatur dan apa yang telah dijalankan oleh Pemerintah Jawa Barat.

Variabel pertama yang dibahas, berkaitan dengan program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Jawa Barat yaitu, *collaboration*. Pemerintah Jawa Barat telah berkolaborasi dengan pemuda Jawa Barat yang dijalankan dalam program Patriot Desa. Patriot Desa ditugaskan untuk memberikan pendampingan dengan

skema tinggal langsung di desa penempatan (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2019). Peran Patriot Desa dalam program OVOC (khususnya dalam penerapan Pahlawan Desa) adalah bersifat pemberian edukasi kepada masyarakat.

Hal lain yang berkaitan dalam kolaborasi dapat dilihat dalam sebuah penelitian tentang *smart city*, yang menyebutkan bahwa kolaborasi dengan pihak luar juga menjadi faktor kunci dalam adopsi *smart city* (Dewi et al., 2018). Sebuah organisasi sering kali mengandalkan pengalaman dan keterampilan mitra saat mempertimbangkan adopsi sistem (Popela et al., 2019). Begitu juga dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Jawa Barat menjalankan program kolaborasi dengan pemuda-pemudi Jawa Barat, yang disebut Patriot Desa. Dengan skema tinggal langsung di desa penempatan, Pemerintah Jawa Barat mengandalkan keterampilan Patriot Desa untuk mengedukasi penduduk perdesaan Jawa Barat agar platform Pahlawan Desa yang sedang dibangun diskominfo dapat diterima oleh pelaku usaha di desa (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2019). Tugas lain dari Patriot Desa adalah dianggap sebagai pendamping atau tenaga ahli untuk penerapan teknologi digital di perdesaan. Hal tersebut sesuai dengan beberapa studi yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya mempengaruhi keputusan adopsi teknologi (Thong, 1999). Maka dari itu penelitian ini akan diuji efektivitas pemerintah Jawa Barat melakukan program kolaborasi, yang dihubungkan sesuai dengan tujuan pemerintah berkolaborasi dengan pemuda desa. Yaitu untuk menciptakan persepsi kemudahan (*Perceive Ease of Use*), sehingga terbentuk penerimaan Pahlawan Desa (*Behavioral Intention to Use*). Kolaborasi juga diharapkan dapat meningkatkan persepsi kemudahan (*Perceive Ease of Use*) yang didasari kepada model TAM (*Technology Acceptance Model*) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan (*Perceive Ease of Use*) memiliki hubungan terhadap penerapan teknologi (*Behavioral Intention to Use*) (Venkatesh et al., 2003).

Variabel selanjutnya yang dibahas adalah *Subjective Norm*. *Subjective Norm* berkaitan dengan data pada Gambar I. 3, dimana penggunaan teknologi di perdesaan masih Jawa barat relatif lebih tertinggal dibandingkan dengan di perkotaan. Namun dibalik ketertinggalan yang dialami warga desa terhadap penggunaan teknologi, mereka tetap menggunakan telepon genggamnya untuk *browsing* walaupun akses internet masih sulit. Hal tersebut karena seseorang akan memiliki keinginan

menggunakan suatu obyek seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya (Mas'ud, 2012), walaupun teknologi akan berdampak negatif pada hubungan antar manusia dalam masyarakat dan keluarga (Younes & Al-Zoubi, 2015). Hal tersebut memberikan perhatian selanjutnya dalam penelitian ini mungkin para pelaku usaha di Perdesaan Jawa Barat akan terpengaruh menggunakan Pahlawan Desa jika mereka mengetahui bahwa pelaku usaha lainnya menggunakan Pahlawan Desa. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan diuji hubungan *subjective norm* terhadap penerimaan Pahlawan Desa (*behavioral intention to use*).

Karena variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini didasari oleh model TAM yang telah dikembangkan oleh Venkatesh & Davis, 2000, dan telah banyak diterapkan oleh banyak penelitian adopsi teknologi. Maka dari itu penelitian ini bersifat hanya menguji kecocokan variabel-variabel tersebut dengan objek yang akan di uji dalam peneltiain ini (unit usaha desa), jika dilihat dari tujuannya yang mengkonfirmasi hipotesis teori dan konsep yang ada maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian *confirmatory* (Hair Jr et al., 2017). Namun penelitian-penelitian sebelumnya, masih belum membahas tentang adopsi teknologi pada unit usaha di Perdesaan Jawa Barat, sehingga semua perlu pengujian lebih lanjut lewat pemodelan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya dapat ditentukan usulan program yang efektif untuk penerimaan (*Behavioral Intention to Use*) Pahlawan Desa bagi pelaku usaha di Perdesaan Jawa Barat.

Pengujian dijalankan dengan metode PLS-SEM. Penggunaan metode tersebut didasari oleh keunggulannya yang mampu untuk memmprediksi dengan teori dasar yang lemah (Abdillah & Hartono, 2015). Keunggulan lainnya yaitu tidak mensyaratkan minimal jumlah sampel tertentu (Hair Jr et al., 2017), yang dimana penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan sampel dalam jumlah besar. Selain itu penggunaan PLS-SEM sudah tepat digunakan dalam peneltiann ini, karena PLS-SEM digunakan untuk penelitian dengan tujuan mengidentifikasi konstruksi "penggerak" kunci. Sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi kontruksi penggerak kunci untuk meningkatkan *Behavioral Intention to Use* Pahlawan Desa.

Konstruksi penggerak kunci yang teridentifikasi selanjutnya akan diolah lebih lanjut dengan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). AHP adalah teori pemecahan masalah berbasis pengukuran perbandingan berpasangan yang bergantung pada penilaian para ahli untuk mendapatkan skala prioritas (Saaty, 2008). Penggunaan AHP dalam penelitian ini, karena AHP dinilai powerful dan fleksibel, dalam menetapkan prioritas-prioritas dan membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif (Warjiyono, 2010). Penggunaan AHP dalam penelitian ini akan digunakan untuk menentukan program yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Jawa Barat untuk meningkatkan *Behavioral Intention to Use* Pahlawan Desa. Usulan Program diambil berdasarkan konstruksi penggerak kunci yang teridentifikasi.

Sehingga pada penelitian ini, akan mengidentifikasi konstruksi penggerak kunci untuk meningkatkan *Behavioral Intention to Use* Pahlawan Desa yang didasari oleh pemodelan TAM dan kerangka kerja TOE dengan menggunakan metode PLS-SEM. Selanjutnya, berdasarkan konstruksi penggerak kunci yang teridentifikasi akan diusulkan program untuk meningkatkan *Behavioral Intention to Use* Pahlawan Desa dengan metode AHP.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini. Maka masalah penelitian dalam tesis ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong penggunaan Pahlawan Desa?
2. Program apa yang dapat dijalankan untuk peningkatan *behavioral intention to use* Pahlawan Desa?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan program yang secara produktif dapat mempengaruhi adopsi Pahlawan Desa dikalangan unit usaha desa di Perdesaan Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, objektivitas yang perlu diraih adalah sebagai berikut:

1. Menentukan faktor-faktor utama pendorong penggunaan Pahlawan Desa.
2. Mengusulkan program untuk meningkatkan *behavioral intention to use* Pahlawan Desa.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan Pahlawan Desa, dengan cara yang lebih efektif untuk Unit Usaha Perdesaan di Jawa Barat.
2. Membantu Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan desa secara umum di wilayahnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari keseluruhan proses penelitian. Pada sub bab ini, peneliti menjabarkan sistematika penulisan dalam tiga bab yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, tujuan dan manfaat dari penelitian yang ada pada penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan tentang kerangka penulisan pada setiap bab.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini membahas tentang penjelasan teori dan referensi relevan secara ringkas yang dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Teori dan referensi tersebut terdiri dari teori dasar, model dasar dan model terkait yang akan dikembangkan dalam penelitian berdasarkan ruang lingkup yang dikaji, serta posisi penelitian. Teori dan referensi tersebut diperoleh dari buku, *e-book*, maupun jurnal terpublikasi pada penelitian terdahulu dalam kurun waktu sepuluh tahun kebelakang.

### **Bab III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini membahas tentang rancangan dari tahapan penelitian yang dilakukan berupa model konseptual dan sistematika pemecahan masalah serta metode yang digunakan. Model konseptual ini merupakan tahapan yang menjabarkan konsep pemikiran yang digunakan untuk merumuskan suatu kerangka kerja atau alur rancangan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sedangkan sistematika pemecahan masalah merupakan tahapan yang menjabarkan konsep

pemikiran yang digunakan untuk membuat kerangka pemecahan masalah dan merumuskan solusi dari penelitian yang dilakukan.

#### **Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini membahas tentang perhitungan hubungan-hubungan variabel yang telah disusun, menggunakan metode PLS-SEM. Perhitungan dilakukan setelah mendapatkan data-data yang didapat melalui kuesioner. Kemudian hasil perhitungan digunakan untuk pengusulan implikasi manajerial dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), sehingga didapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **Bab V Kesimpulan Dan Saran**

Pada bab ini membahas tentang hasil-hasil yang didapat dalam serangkaian penelitian, guna menjawab perumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga membahas saran untuk penelitian selanjutnya, yang didasari oleh hambatan-hambatan atau kekurangan dalam penelitian ini.